

MODEL PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Herawati¹, Sahrani².

^{1,2}IAIN Parepare

Abstract: *Micro and small enterprises (UMKM) are key actors in the economy. These business entities play a crucial role in national economic development, such as contributing to the gross domestic product, creating jobs, and making investments. This study aims to analyze the operational models of research institutions. LKMS (Islamic Microfinance Institutions) empower SMEs in Indonesia. The analysis describes these models. The findings explain the impact of microfinance on strengthening small enterprises. From a modeling perspective, LKMS can enhance the production of small and medium enterprises. There are various microfinance models to strengthen small businesses. Specifically, Islamic financial institutions can utilize these models, which include solidarity groups, village bank models, grammar models, and individual models.*

Article history:

Received May 23, 2024

Revised July 6, 2024

Accepted July 6, 2024

Available online July 1, 2024

Keywords: UMKM, LKMS.

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Cite this document:

***Corresponding author**

Doi

Page

Turabian 8th edition

e-mail: Herawati@iainpare.ac.id

DOI 10.35905/balanca.v6i1.10304

1-11

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

PENDAHULUAN

Dunia sedang mengalami masa sulit saat ini. Untuk melawan pandemi Covid-19, dampak yang sangat besar penguatan ekonomi global OECD, pandemi saat ini menjadi ancaman terbesar di industri ekonomi Internasional pada tahun 2008-2009, ia mengalami resesi yang parah. Jawaban atas pandemi ini adalah UNCTAD, badan perdagangan dan pembangunan pertolongan PBB untuk memperingatkan bahwa telah terjadi konflik. Pertumbuhan global melambat 2% pada tahun 2020, apa yang akan terjadi pada akhirnya itu bisa menghilangkan lebih dari \$1 triliun total nilai ekonomi global dimana itu terjadi akibat kerusakan.¹ Richard Kozul-Wright, Kepala Departemen globalisasi dan strategi pembangunan UNCTAD mencatat: Perkiraan perlambatan ekonomi global harganya bisa sekitar kurang dari 2% per tahun, di bandingkan dengan \$1 triliun prediksi orang pada september 2019.

Pada masa pandemi Covid-19 yang berlarut-larut ada banyak masalah manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan tumbuh setelah pandemi, masalah sosial yang di perlukan hampir setiap negara di dunia termasuk di negara berkembang Indonesia. Berbagai tindakan Relief di berbagai daerah seperti bantuan langsung tunai, paket sembako, pendidikan, medis dan subsidi lainnya contohnya perumahan, semua selesai dengan pemerintah bekerja sama dengan para pihak yang bersikap profesional dan melakukan hal baik. Pemerintah dan institusi terkait, tetapi masalahnya adalah kuantitas dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, sebelum pandemi Indonesia masih memiliki kewajiban untuk memerangi kemiskinan. Angka ini 13% dan saat ini sedang naik daun dengan adanya pandemi covid-19 ini.²

¹ UN-News. "Coronavirus Update: COVID-19 Likely to Cost Economy \$1 Triliun during 2020, Says UN Trade Agency." Online News, 2020

² Maital, Shlomo and Ella Barzani. "The Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research." Samuel Neaman Institute for National Policy Research, no. March 2020: 1-12

Pemaparan akhlaq menarik untuk di simak. *Harian Jakarta Pos* kata perekonomian Indonesia di harapkan melambung naik kembali pada tahun 2021 setelah syok pada keadaan resesi 2020 kemarin.

Perekonomian Indonesia bisa di ramalkan akan meningkat pada tahun 2021 setelah pengalaman resesi tahun lalu. Tetapi pengangguran dan kemiskinan terus berkembang karena pandemi COVID-19 belum berakhir dan ekonomi masih perlahan di tahun 2021 dan seterusnya itu dari perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat sekitar 3%, karena ada percepatan pertumbuhan bertahap melalui pengeluaran rumah tangga dan pertumbuhan pinjaman dan vaksinasi yang di mulai.

Karena pandemi COVID-19 di perkirakan 1,63 juta orang Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan. Kenaikan terjadi pada maret 2020. Tingkat kemiskinan hingga 9,78% atau 26,4 juta pada 9,22% pada september 2020, hasil lainnya harus ada yang mengisi kemiskinan. Perkiraan pemerintah tumbuh sebesar 0,6% berubah 1,7% pada tahun ini sebelum pemulihan kenaikan sekitar 5% pada tahun depan dengan nomor kemiskinan meningkat 10,5% atau sekitar 28 juta pengangguran bisa bertahan hingga 2021, ini meningkat menjadi 3,6 juta terutama pekerja migran, karena kurangnya pekerjaan.³

Pemerintah bekerja untuk meningkatkan biaya sosial dan infrastruktur merangsang permintaan dalam negeri membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk memberantas kemiskinan. November pada tahun 2020, pemerintah memiliki 58,7 dengan bunga sebesar Rp 695,2 triliun (\$ 49 miliar). Insentif di berikan revitalisasi ekonomi. Program stimulus di harapkan berhasil. Kekuatan pendorong kegiatan

³ Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2(2):83-92. (2020)

ekonomi semoga vaksin yang tersedia di tahun 2021 dapat mempertahankan momentum ini, pemulihan dan reformasi ekonomi akan di lanjutkan.⁴

Pemulihan ekonomi Indonesia sedang dalam resesi akibat pandemi Covid-19 harus segera di pantau. Pemerintah khususnya program Pemberdayaan mikro dan UKM(Usaha Kecil dan Menengah) melalui jaringan Kelembagaan Keuangan Mikro (LKM) dan institusi Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Situasi perekonomian tampaknya berada dalam resesi sekarang. Yang memperlambat kerja bisnis LKM karena tingginya kredit/keuangan buruk. LKM juga memiliki masalah administrasi modal, usaha tambahan kapasitas tenaga kerja yang tersisa LCM tidak optimal untuk manajemen. LKMS juga stagnan dengan masalah likuiditas.

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bisnis kecil (MOB) adalah komponen bisnis yang berpartisipasi penting untuk pembangunan perekonomian Indonesia terkhusus Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan. Kontribusi UKM terhadap PDB nasional pada 2013, jumlahnya mencapai \$5,44 miliar, jika dalam Rupee dan impor tersedia ada 96,99% atau 114.144.000 orang. Jumlah usaha kecil meningkat sebesar 2,41% yaitu berkisar pada tahun 2012 dan 2013 itu mencapai 57,89 juta unit struktural, dimana 99,99 persentasenya adalah usaha kecil, jadi usaha kecil sangat di butuhkan masyarakat, khususnya manusia yang berpeluang dalam ekonomi dan keterampilan terbatas.

Tautan data Kementerian Koperasi RI Hashtag berita adalah pangsa UKM dalam PDB sejak 2010-2020 sebagai berikut:

⁴ Akhlaq, Adrian Wail. *"Indonesia's Economy to Grow in 2021 but Poverty, Unemployment to Remain High."* Jakarta Post, 2020.



Sumber data: Badan pusat statistik

Juga dilayani oleh sektor usaha kecil yang kontribusinya sangat penting untuk perekonomian Indonesia dalam krisis selama pandemi Covid-19. Saat ini usaha kecil yang berkelanjutan menghadapi krisis ekonomi karena tidak banyak usaha kecil bergantung pada faktor eksternal seperti utang dalam mata uang asing dan komoditas masuk selama pelaksanaan pekerjaan berfungsi. Kelangsungan hidup usaha kecil manajemen krisis bidang ini memiliki kelebihan lebih berpeluang untuk berkembang dalam kebijakan yang tepat dan mendukung pengaturan yang benar. Pemerintah Indonesia menerapkan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan usaha penampilan rata-rata. Perkembangan dan pertumbuhan bisnis menciptakan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi nasional sejujurnya.

METODE PENELITIAN

Kajian kualitatif terhadap Gunawan itu adalah tindakan yang di sengaja. Amati kejadian sosial yang mendalam seperti di lingkungan sekitar dan kehidupan yang saling berinteraksi mencoba memahami bahasa dan menafsirkan dunia secara langsung terkait dengan itu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang di peroleh dari informan. Kunci penyedia informasi kelompok UMKM dan LKM/LKMS. Komentar atas hasil pemantauan negara dan acara di lokasi dan melaporkan hasil wawancara. Kemampuan analisis data di

susun menggunakan model interaktif.⁴ aliran aktivitas yaitu pengumpulan data, reduksi data (penerbit data), penyajian data (presentasi informan) dan kesimpulan serta rekomendasi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Mikro

Pemerintah sudah menyiapkan dana seperti bisnis dan dunia sosial melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan dan perbaikan modal usaha mikro, lingkungan kecil. Dari segi mikro, Keuangan Mikro lebih jelas “Inferioritas” atau keterbatasan, yaitu kompleks inferioritas orang miskin (kecil) memiliki akses yang sulit dan terbatas terutama untuk layanan keuangan/perbankan. Dari perspektif keuangan mikro, atau untuk fasilitas yang di tunjuk secara bersyarat, kredit mikro adalah pinjaman kecil kepada orang miskin untuk mendanai kegiatan produksi, membuat dan menghasilkan pendapatan, dimana mereka jaga diri dan keluarga.⁶

Kontribusi keuangan mikro untuk mengurangi beberapa faktor penyebab kemiskinan, fakta di tangan dapat di mulai dengan menghasilkan pendapatan. Pendanaan membantu mikro reduksi kemiskinan, tingkat yang meningkat, pendidikan dan produksi atau jutaan usaha kecil yang berkembang, bahkan ide keuangan mikro ini telah tersebar luas. Direplikasi di seluruh dunia, termasuk Afrika dan Amerika latin, Asia, Eropa Timur dan Nasional. Seperti juga Negara-negara maju seperti Norwegia, Amerika Serikat dan Inggris.⁷

⁵ Gunawan, Imam. Metode Penelitian kualitatif. 1 st ed. Jakarta: Bumi Aksara. 2013

⁶ Gina, Widya and Jaenal Effendi. “Program pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi).” Jurnal Al-Muzara’ah 3(1):33-43. 2015

⁷ Rahman, Abdul Rahim Abdul. “Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation.” *Humanomics* 26(4): 284-95. 2010

Keuangan mikro memiliki tiga bagian. Faktor utama yang membedakannya serta sistem perantara keuangan lain perbankan yaitu Limit transaksi, nilai ini bukan operasi keuangan mikro..Ini berarti bahwa tidak ada kesepakatan universal nilai-nilai Internasional pekerjaan subkategori atau mikropon. Biaya transaksi di Indonesia hanya keuangan mikro yang telah di formalkan dan batas maksimum kredit mikro hanya 50 juta rupiah.⁸ Mengenai transaksi tabungan, asuransi dan aset keuangan lainnya tidak ada transfer bank, tidak ada sistem pembayaran parameter yang jelas.

Segment Pasar Microfinance

Keuangan mikro memiliki lembaga atau dengan kata lain keuangan mikro ini melayani masyarakat dengan sasaran dalam masyarakat yang terpecah belah dan masuk kategori miskin di dalam 4 kelompok: (1) yang termiskin ditandai dengan faktor-faktornya, ada yang bersumber dari pendapatan, usia, penyakit atau kecacatan maupun kesuksesan. (2) Ini bekerja dengan buruk. kelompok orang miskin yang bekerja sebagai buruh yang berpenghasilan sangat terbatas juga tidak teratur umumnya musiman, bekerja di sektor pertanian maupun yang padat karya. (3) Spontan layanan buruk, sebagai seorang penduduk tergolong miskin yang berpenghasilan relatif baik dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup bekerja di sektor informal. (4) yang tergolong miskin yang aktif secara ekonomi. Kelompok itu memperoleh kekuatan ekonomidengan sumber penghasilan yang cukup menyediakan kebutuhan dasar hidup yang berlebihan.

Kasus keuangan mikro sekarang tidak dapat di pisahkan dari sejarah kelahiran dapat di atasi dengan masalah serupa dengan kemiskinan. Perkembangan selanjutnya keuangan mikro ada dalam agenda mencapai milenium. Tujuan pembangunan untuk di kurangi populasi dunia telah berkurang setengahnya pada tahun 2015. Kemudian itu

⁸ Worokinasih, Saporila. "Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Mikro, Kecil dan Menengah." Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik 7 (2): 252-71. 2011

menguat pada resolusi PBB No.A/58/488 Tahun 2005 adalah tahun kredit mikro dunia mendorong keuangan mikro sebagai sektor keuangan inklusif.

Layanan keuangan mikro yang tersedia yaitu pemerintah,individu,sektor swasta,organisasi non-pemerintah,lembaga keuangan formal atau informal.Melakukan layanan keuangan mikro seperti layanan perbankan di sebut *Microbanking*.*Microbanking* adalah layanan perbankan yaitu lembaga keuangan resmi yang harus bisa melayani sektor mikro.Biasanya informal atau metode entri informal ke dalam mikrosektor yang bergerak di sektor perbankan resmi.

Indonesia memiliki dua LKM.Kategorinya,yaitu LKM berbentuk bank Unit BRI Desa,BPR dan BKD (lembaga perkreditan Kota),dan non perbankan Koperasi Simpan Pinjam (KSP),simpan pinjam (USP),Lembaga Dana Pinjaman Desa(LDKP),Baitul Mal Batanville(BMT),Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM),Arisan,model keuanganGrameen,model Dana ASA,Group Swadaya Masyarakat(KSM) dan serikat kredit.

Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM)

UKM adalah kegiatan kewirausahaan kemampuan untuk memperluaslapangan kerja,dan kami menawarkan berbagai layanan ekonomi serta dapat memainkan peran didalam komunitas.Dalam proses pemerataan dan perbaikan keberhasilan dan insentif masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi.Mikro kecil menengah berkuasa atas dukungan kunci,bantuan,perlindungan dan berkembang seluas mungkin.Identity yang kuat dengan kelompok tanpa mengabaikan usaha ekonomi rakyat yang berperan di perusahaan besar.⁹

Perusahaan kecil adalah perusahaan Ekonomi Industri Independen,individu ini di lakukan dengan hal-hal yang bukan anak cabang perusahaan

⁹ Rosmiati. "Analisis Program Bantuan Modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Oleh Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Jambi." Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan 1 (3): 239-244. 2012

atau perusahaan properti ini menurun atau bagian langsung maupun secara tidak langsung. Bisnis menengah atau perusahaan besar itu sesuai dengan tingkat bisnis kecil yang di dominasi oleh hukum. Bisnis menengah adalah perusahaan Ekonomi Industri Independen dari kekayaan murni dari penjualan tahunan yang di atur oleh hukum terapan.

Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Max. 50 juta	Max. 300 juta
2.	Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	500 juta – 10 Miliar	2,5 Miliar – 10 Miliar

Sumber data: Badan pusat statistik

Kinerja LKM/LKMS Terhadap Penguatan UMKM

Peran lembaga keuangan mikro ketika menghabiskan uang usaha kecil, bahkan LKM/LKMS memiliki aset dan modal yang terbatas. Namun janji pemberdayaan terus berlanjut sampai selesai, terutama implementasinya dalam pembiayaan usaha kecil.

Rilis pada akhir 2020 kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil tumbuh, ini akan di laporkan oleh departemen layanan seperti keuangan, LKM/LKMS, kredit/keuangan. Baru di tahun 2021 tingginya permintaan di Ibu Kota terhadap potensi pertumbuhan contohnya saat ini, ada lebih dari 65 juta usaha kecil dan menengah. tersebar luas di Indonesia. Tahun 2016 terdapat 61,7 juta UKM di Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah itu terus bertambah, jumlah UKM sebanyak 62,9 juta. Jumlah UKM pada tahun 2018 mencapai 64,2 juta dan menurut perkiraan tahun 2019, 2020 dan 2021, jumlah ini akan terus bertambah.

Tabel 3. Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)		Porsi		qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Perdagangan besar dan eceran								
Baki Debet	528.042	505.656	508.227	49,65%	-3,51%	0,51%	8,41%	-3,75%
NPL	20.024	20.059	18.835	3,71%	-0,06%	-6,10%	5,61%	-5,94%
Industri pengolahan								
Baki Debet	104.160	107.341	108.040	10,55%	-2,99%	0,65%	10,05%	3,73%
NPL	3.916	5.211	5.337	4,94%	11,06%	2,42%	7,58%	36,29%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan								
Baki Debet	103.315	110.977	116.335	11,36%	0,02%	4,83%	23,17%	12,60%
NPL	2.632	2.358	2.602	2,24%	-9,06%	10,35%	18,08%	-1,14%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	6.230	5.308	3.676	0,36%	-5,21%	-30,75%	115,50%	-41,00%
NPL	149	91	77	2,09%	-23,53%	-15,38%	21,14%	-48,32%
Lainnya								
Baki Debet	297.873	286.156	287.357	28,07%	-3,13%	0,42%	15,93%	-3,53%
NPL	12.396	13.656	14.537	5,06%	1,80%	6,45%	15,61%	17,27%
Baki Debet UMKM	1.039.620	1.015.438	1.023.635		-2,99%	0,81%	12,34%	-1,54%
NPL UMKM	39.117	41.375	41.388	4,04%	1,19%	0,03%	9,65%	5,81%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2020)

KESIMPULAN

Efek keuangan mikro kelembagaan memperkuat keuangan mikro syariah dengan sudah berjalannya usaha kecil dengan baik, namun masih terbatas. Situasi ekonomi selama pandemi Covid-19, dari perspektif modal, LKM/LKMS di subsidi oleh pemerintah, ini dapat menarik modal bagi UKM. Oleh karena itu, produksi UKM tumbuh.

Model keuangan mikro terdapat berbagai model dalam penguatan UKM, ini adalah model yang dijelaskan oleh Ramdanyah. Berikut adalah model keuangan mikro yang dapat juga di laksanakan oleh lembaga keuangan Islam adalah model kelompok koperasi, model BPR, MODEL Grameen Bank dan Model Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Akhlas, Adrian Wail. 2020. "Indonesia's Economy to Grow in 2021 but Poverty, Unemployment to Remain High." The Jakarta Post, 2020

- Gina, Widya, and Jaenal Effendi. 2015. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)." *Jurnal AlMuzara'ah* 3 (1): 33-43.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2 (2): 83-92.
- Maital, Shlomo, and Ella Barzani. 2020. "The Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research." Samuel Neaman Institute for National Policy Research, no. March 2020: 1-12.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2010. "Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation." *Humanomics* 26 (4): 284-95.
- Rosmiati. 2012. "Analisis Program Bantuan Modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Oleh Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 1 (3): 239-244.
- UN-News. 2020. "Coronavirus Update: COVID-19 Likely to Cost Economy \$1 Trillion during 2020, Says UN Trade Agency." *Online News*, 2020.
- Worokinasih, Saparila. 2011. "Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP)* 7 (2): 252-71.